



Media: Koran Tempo

Hari: Jumat

Tanggal: 10 Maret 2017

Halaman: 28

Sultan Belum Berencana Relokasi Warga Bantaran Code

Pembangunan talut dianggap melegalkan permukiman di area rawan bencana.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menuturkan belum berencana mengeluarkan instruksi relokasi bagi warga bantaran Kali Code menyusul ambrolnya talut sungai. Ia masih menunggu penanganan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-

Opak.

Menurut Sultan, relokasi bukanlah pilihan yang mudah. Meminta warga bantaran kali untuk pindah dengan inisiatif sendiri juga bukan perkara gampang. "Kalau warga diminta pindah dari bantaran juga *durung karuan gelem* (belum tentu mau)," ujarnya di kantornya, kemarin.

Senin lalu, talut sisi timur Code, tepatnya di Kampung Blimbingsari, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, kem-

bali longsor. Bagian yang longsor sepanjang 20 meter dengan tinggi sekitar 30 meter. Longsor menutup sebagian aliran Sungai Code.

Akibatnya, sembilan keluarga yang tinggal di pinggir talut harus mengungsi. Pada awal 2016, bagian talut setinggi 20 meter dengan panjang sekitar 10 meter di Kampung Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, juga longsor. Akibatnya, 37 warga dievakuasi.

Sultan mengungkapkan, pemerintah memilih untuk memberi contoh secara langsung agar warga bantaran bersedia direlokasi, yakni melalui program

rumah kampung susun Gemawang yang dibangun di bantaran Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman. Program percontohan itu akan dimulai tahun depan khusus bagi warga bantaran Code yang permukimannya terlalu memakan sempadan sungai.

"Pembebasan lahan Gemawang ini sudah selesai dan mulai dibangun. Ini nanti untuk contoh (merekasi warga bantaran Code)," ujar Sultan.

Sultan meminta Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Balai Besar Wilayah Sungai menggunakan kewenangan mereka untuk menyelesaikan masalah permukiman di bantar-

an Code. Ia menyatakan tak mau mengintervensi masalah tersebut. "*Opo masak aku le nangani* (Apa-apa masak saya yang menangani)," kan enggak berkembang kalau mereka diintervensi terus," ujarnya.

Namun, kata dia, jika instansi-instansi tersebut tak sanggup, pemerintah provinsi siap mengambil alih penanganan tanah longsor yang terus berulang di Code.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, Tri Bayu Adji, mengatakan pihaknya tak akan membangun talut yang ambrol di bantaran Code karena khawatir dianggap melegalkan permukiman di area rawan bencana.

"Kami tidak akan membangun kembali talut karena awalnya juga bukan kami yang membangun talut itu. Jadi, kami berfokus pada penanganan dan pembersihan sungainya," ujar Bayu.

Bayu menuturkan, tebing tersebut longsor karena pembangunannya tak memperhitungkan beban permukiman yang berdiri di atasnya. "Kami salah secara undang-undang jika membangun ulang talut itu ketika masih ada permukiman di atasnya. Biarkan alami saja dan tak ada permukiman di atasnya," ujar Bayu. Ia lebih setuju jika kawasan tersebut digunakan untuk ruang terbuka hijau. ● PRIBADI WICAKSONO

Tingkat	Tindak Lanjut
Segera	☐ Untuk Ditanggapi
	☒ Untuk Diketahui
	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005